



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : BADAN KEUANGAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HAPSARI SEKARTAJI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 757664

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.581.000.000
1. Tanah Seluas 211 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 211.000.000		
2. Tanah Seluas 91 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000		
3. Tanah Seluas 5.880 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
4. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
5. Tanah Seluas 309 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
6. Tanah Seluas 103 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000		
7. Tanah Seluas 160 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000		
8. Tanah Seluas 1.070 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 1.070.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	5.000.000
1. MOTOR, HONDA SUPRA X 125CC Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	40.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	50.000.000



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----

Rp. 2.676.000.000

III. HUTANG

Rp. 295.208.540

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.380.791.460

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.